

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

**Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh (Friska J. Purba *et al.*, 2022) yang berjudul “Meningkatkan Minat Belajar Siswa Selama Pandemi Covid-19 Melalui Bimbingan Belajar Online”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan tentang bimbingan belajar online yang dilakukan dengan metode *online learning*. Pandemi COVID-19 telah merenggut kenyamanan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kenyamanan belajar mengajar terenggut dikarenakan pemerintah menutup sekolah dan perguruan tinggi untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang kian merebak. Akibatnya, sistem pembelajaran harus diubah dari tatap muka (luring) menjadi tatap maya (daring). Pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dilakukan menyebabkan dampak negatif bagi siswa, salah satunya ialah penurunan minat dan semangat belajar. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang menarik dan bermakna. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Program Studi Pendidikan Kimia bekerja sama dengan jemaat GKPS Tangerang untuk membuat Pos Bimbingan Belajar Online Gratis yang diberi nama Pos Diakonia untuk membantu anak-anak, khususnya anak-anak jemaat GKPS dalam memahami materi sekolah dan meningkatkan minat dan semangat belajar siswa.

**Kedua**, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Malik, 2023) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala Desa Junrejo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Bantuan Transport Sekolah Bagi Masyarakat Pra Sejahtera Oleh Pemerintah Desa Junrejo” menjelaskan menyatakan bahwa, implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Junrejo dalam penyelenggaraan program bantuan transport sekolah bagi masyarakat prasejarah berjalan cukup baik. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari George C. Edward III dimana teori tersebut memiliki empat

variabel yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Penelitian yang dilakukan dan mengacu pada teori tersebut, memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan keempat variabel yang ada. Tujuan dari adanya bantuan transport sekolah untuk masyarakat prasejarah ini untuk mempermudah masyarakat yang kurang mampu agar lebih mudah mengakses sekolah dan meringankan beban masyarakat dalam hal biaya transport ke sekolah.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh (Hendrawati, Ismanto and Iriani, 2021) yang berjudul “Pengembangan *Website* Bimbingan belajar di Sekolah Dasar”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dengan melakukan penelitian Research and Development (R&D). Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan lembar angket. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan belajar dan merancang *website* bimbingan belajar di SDN Cebongan 1 Salatiga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan bimbingan belajar di SDN Cebongan 1 Salatiga dilakukan secara konvensional. Hal ini membutuhkan banyak tenaga dan juga waktu. Sehingga kegiatan bimbingan belajar yang dilakukan masih terbatas dan kurang lengkap, serta tidak tersedia dalam jangka waktu yang singkat saat dibutuhkan. Kemudian dilakukan pengembangan website bimbingan belajar. Produk di ujicobakan kepada 3 guru kelas dan 84 siswa. Hasil ujicoba produk telah mencapai kualifikasi sangat valid dengan ditunjukkan persentase 84.17% oleh guru dan 81.09% oleh siswa. Pengembangan website bimbingan belajar memfasilitasi pelaksanaan bimbingan belajar yang efektif dan efisien karena website memberikan peningkatan pelayanan dan kualitas bimbingan belajar.

**Keempat**, penelitian yang dilakukan oleh (Prasetya *et al.*, 2019) yang berjudul “Kegiatan Bimbingan Belajar dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa di Kelurahan Bolong Karanganyar”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini yaitu kegiatan bimbingan belajar yang dilakukan di kelurahan Bolong Karanganyar ini berjalan dengan baik dan mendapat respon positif. Dengan adanya bimbingan belajar ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efisien dan

efektif jika pengajar atau pembimbing mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dan menarik perhatian siswa. Hal tersebut diharapkan mampu mengembalikan fokus siswa dalam belajar dan membuat siswa dapat memahami materi dengan mudah.

**Kelima**, penelitian yang dilakukan oleh (Banna, Limbong and Sunaryo, 2021) yang berjudul “Pengaruh Bimbingan Belajar Secara Online atas Prestasi Belajar Matematika Siswa di Kelas XII SMK Kristen Tagari di Kota Rantepao”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang berbentuk studi korelasi, yaitu penelitian yang akan mempelajari hubungan yang saling mempengaruhi antara dua variabel atau lebih. Populasi dari penelitian ini adalah semus siswa kelas XII SMK Kristen Tagari di Kota Rantepao. Cara dalam penetapan sampel dilakukan dengan memakai “teknik *purposive sampling*”. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data yang digunakan adalah melalui angket bimbingan belajar online serta tes hasil belajar berupa soal try out. Hasil penelitian ini menunjukkan ketuntasan belajar siswa sebesar 100% dengan rata-rata nilai perolehan 76,48. Persamaan ini dapat digunakan untuk memprediksi bagaimana individu dalam variabel terikat (hasil belajar matematika) akan terjadi, jika individu dalam variabel bebas (bimbingan belajar online) ditetapkan. Bimbingan Belajar Online akan Prestasi Hasil Belajar Matematika siswa Kelas XII SMK Kristen Tagari di kota Rantepao. Besarnya pengaruh bimbingan belajar online terhadap prestasi hasil belajar matematika siswa adalah sebesar 12,3% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan temuan-temuan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh bimbingan dalam belajar secara online atas prestasi belajar matematika siswa di kelas XII SMK Kristen Tagari di Kota Rantepao.

**Keenam**, penelitian yang dilakukan oleh (Citra, 2017) berjudul “Implementasi Program Pendidikan Gratis pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan/observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian Ini membahas tentang permasalahan pendidikan yang masih belum maksimal di beberapa daerah terutama di Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, telah disimpulkan bahwa implementasi pendidikan di Kota Bengkulu secara

keseluruhan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena masih banyak aspek yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah Bengkulu. Kendala terbesar yang sering kali terjadi dalam proses implementasi program pendidikan gratis salah satunya adalah terhambatnya proses implementasi berkelanjutan akibat dari pergantian kepala daerah. Setiap kali adanya pergantian daerah, maka kepala daerah baru akan mempunyai visi dan misinya yang harus didahulukan sehingga program atau visi misi dari kepala daerah sebelumnya kemungkinan akan dibiarkan begitu saja. Kemudian kendala lain seperti minimnya APBD Kota Bengkulu, rendahnya partisipasi dari masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan dan kurangnya peran Komite Sekolah. Hal tersebut membuat implementasi pendidikan gratis pada jenjang pendidikan di Kota Bengkulu Pada jenjang pendidikan dasar menjadi kurang maksimal.

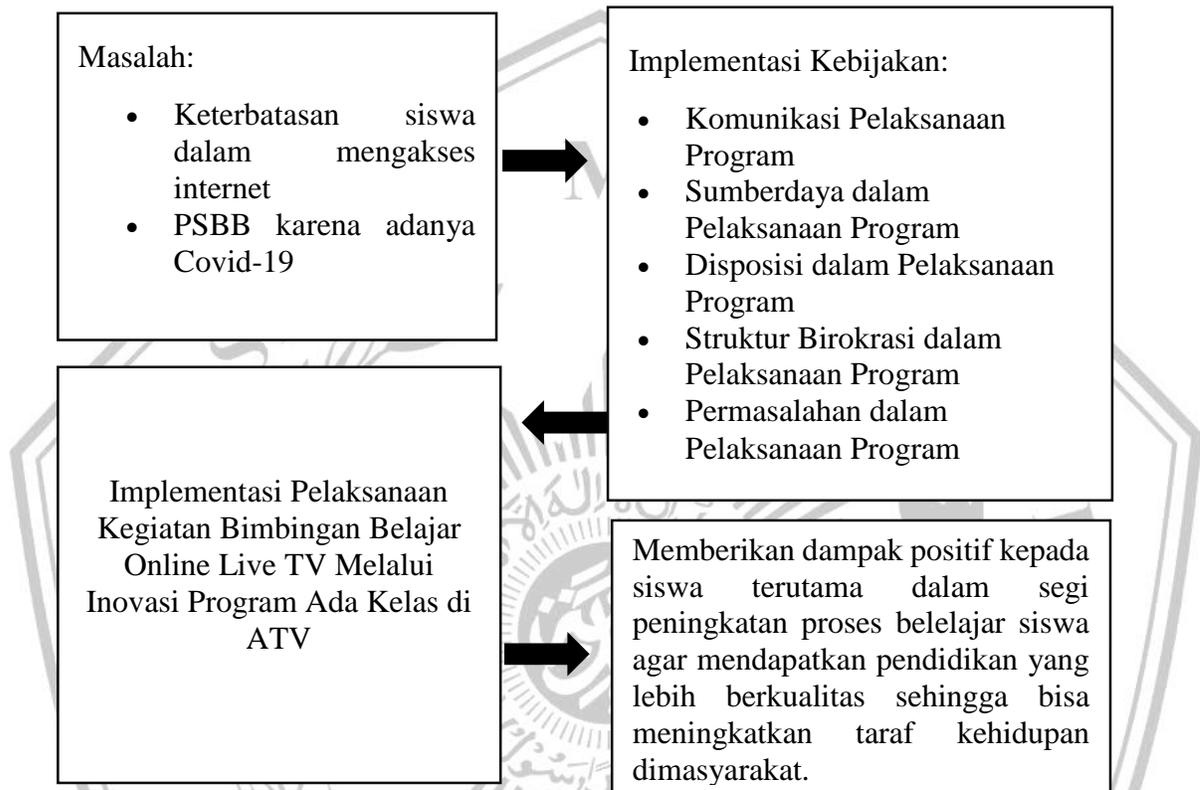
**Ketujuh**, penelitian yang dilakukan oleh (Fahmi, 2021) berjudul “Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Proses Pembelajaran”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini, memfokuskan pada pemenuhan hak anak dalam hal mendapatkan pendidikan yang aman dari diskriminasi, penyelewengan hak pendidikan anak dan kekerasan sehingga dapat memenuhi tumbuh kembang anak. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, hasil monitoring dan evaluasi dari implementasi program SRA di SDN 8 Sokong. Dalam pelaksanaannya, kebijakan program SRA merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang diatur dalam peraturan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) no. 8 tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak (SRA). Selain itu juga tetap mengacu pada UU No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional dan prinsip perlindungan anak. Hasil dari penelitian ini yaitu perencanaan program telah memenuhi SOP, kemudian pelaksanaan program telah memenuhi indicator yaitu bebas dari diskriminasi dan kekerasan dan monitoring dilakukan dengan dilakukan dengan mengisi kuisioner yang dilakukan oleh pihak dari sekolah.

**Kedelapan**, penelitian dilakukan oleh (Arianto and Wirasenjaya, 2019) berjudul “Upaya Pemerintahan Joko Widodo Dalam Mendorong Implementasi *Sustainable Development Goals* di Indonesia (*President Joko Widodo’s Effort in Implementing Sustainable Development Goals in Indonesia*)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan metode pengumpulan data yaitu melalui pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah sebuah program yang dirancang untuk membuat sebuah gebrakan baru pada pembangunan berkelanjutan. Program ini merancang adanya pembangunan dibidang ekonomi, pendidikan kesehatan dan lain sebagainya demi mewujudkan masyarakat sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa upaya Presiden Joko Widodo dalam mendorong implementasi SDGs adalah melalui integrasi SDGs untuk mendorong pembangunan alternative, khususnya pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi hijau (*Green economy*) dalam implementasi SDGs.

**Kesembilan**, penelitian yang dilakukan oleh (Pradini, Sudjanto and Nurjannah, 2019) yang berjudul “Implementasi Program Sekolah Adiwiyata Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia di SDN Tanah Tinggi 3 Kota Tangerang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini difokuskan pada program Sekolah Adiwiyata dalam meningkatkan pendidikan berkualitas, faktor pendukung, faktor penghambat, dan pelaksanaan program secara keseluruhan. Landasan kebijakan program tersebut berdasarkan dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata mengenai pengembangan sekolah. Kebijakan program sekolah dilandasi oleh memorandum bersama antara Kemenag dengan Mendiknas No. 0142/U/1996 dan No. Kep 89/MenLH/5/1996, kesepakatan bersama menLH dengan Depdiknas KEP 7/MenLH/06/2005 dan No. 05/VI/KB/2005, UU No. 20 tahun 2003, UU RI No. 32 tahun 2009. Kemudian kendala dan hambatan yang terdapat selama pelaksanaan program antara lain masih kurangnya kepedulian dan partisipasi warga sekolah, kurangnya kemampuan guru dalam menyiapkan media pembelajaran yang kreatif dan menyusun RPP. Penelitian ini menunjukkan bahwa program tersebut berhasil dilaksanakan, sehingga jaminan adanya

peningkatan mutu pendidikan telah tercapai walaupun tetap ada kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.

## 2.2 Kerangka Teori



## 2.3 Kajian Pustaka

### 2.3.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat diartikan sebagai kebijakan atau peraturan yang ditujukan untuk kepentingan umum. Implementasi suatu kebijakan akan menunjukkan seberapa besar manfaat bagi masyarakat. Implementasi berpengaruh besar terhadap proses pembuatan kebijakan dan pembuatan peraturan. Pengertian implementasi menurut beberapa ahli sebagai berikut.

Teori George C. Edward III dalam (Anta Kusuma and Simanungkalit, 2022) berpandangan bahwa Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

### 1. Komunikasi.

Keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan dan pembuatan peraturan bergantung pada komunikasi. Hal ini mengharuskan pelaksana kebijakan untuk memahami apa yang seharusnya dilakukan dan memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan dikomunikasikan kepada *target group* dan dapat meminimalisir penyimpangan implementasi. Komunikasi merupakan unsur penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Unsur komunikasi dalam organisasi merupakan penjabaran tujuan kebijakan public agar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara optimal. Dalam setiap kebijakan publik pihak-pihak yang berkaitan pasti ada yang tidak sejalan dan bisa saja menentang kebijakan yang dipilih. Dengan demikian unsur komunikasi harus mampu membentuk pemahaman bersama guna meningkatkan kinerja dan melaksanakan kebijakan public yang telah ditentukan.

### 2. Sumberdaya

Walaupun kebijakan sudah di komunikasi secara konsisten dan jelas, implementasinya tidak akan efektif apabila para pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, seperti penerapan keterampilan dan sumber daya finansial atau anggaran, seperti insentif. Implementasi kebijakan yang dipilih suatu pemerintah memerlukan dukungan dari sumber daya yang memadai. Sumber daya dapat berupa fungsi, kewenangan, pegawai, keuangan, informasi, sarana dan prasarana seperti gedung, peralatan, lahan dan perlengkapannya.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan sebuah perintah atau instruksi yang diberikan oleh atasan terhadap para anggotanya untuk segera menindaklanjuti suatu hal. Selain itu disposisi juga dimaknai sebagai bentuk kepribadian dan karakteristik dari seorang pelaksana kebijakan. Kepribadian dan karakter yang dimaksud seperti komitmen, integritas dan sifat demokratis. Implementasi kebijakan tidak akan

efektif apabila pelaksana kebijakan mempunyai perilaku dan pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan publik juga dipengaruhi oleh sikap dan upaya masyarakat dalam melaksanakan kebijakan yang ditunjukkan oleh pemahaman kegiatan yang dikerjakan dan memiliki kemampuan untuk mengerjakan dan memahami kebijakan publik. Oleh karena itu, unsur penegakan sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan diharapkan dapat dilaksanakan sejak tahap awal ketersediaan layanan, peraturan dan penegakan hukum.

#### 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh besar terhadap implementasi aspek struktur birokrasi meliputi *Standar Operating Prosedur* (SOP) dan fragmentasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan control sehingga menimbulkan prosedur administrasi yang rumit, yang pada akhirnya membuat operasional organisasi menjadi tidak fleksibel. Kebijakan public hanya dapat diimplementasikan apabila pihak melaksanakan kebijakan tersebut mempunyai wewenang. Oleh karena itu, suatu organisasi memerlukan struktur birokrasi yang rinci. Struktur organisasi pelaksanaan kebijakan public harus mempunyai SOP yang terperinci dan dapat dilaksanakan. SOP ini berfungsi sebagai panduan bagi organisasi dan komunitas untuk mengevaluasi implementasi kebijakan yang dipilih. Selain itu, SOP harus mempertimbangkan kesederhanaan administrasi sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Menurut teori Jones (Nofriandi, 2017) implementasi: “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (Proses pelaksanaan suatu program untuk menunjukkan hasil), sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan masyarakat, individu atau kelompok yang merupakan pencapaian atau tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya). Oleh karena itu, implementasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah ditetapkannya sebuah

kebijakan. Implementasi kebijakan public adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di pemerintahan dan sektor swasta untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Artinya implementasi tidak akan terjadi sampai undang-undang dan dana dialokasikan untuk implementasi.

Menurut Syaukani dalam (Dzulqarnain, Megawati and Basori, 2022) menyatakan bahwa implementasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan suatu kebijakan kepada masyarakat dan mencapai hasil yang diinginkan. Rangkaian kegiatan ini meliputi: (1) Mengembangkan seperangkat peraturan lain untuk menjelaskan kebijakan tersebut. (2) Mempersiapkan sumber daya pendukung kegiatan-kegiatan implementasi, yang meliputi sarana, prasarana, sumber daya keuangan dan tentunya menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut. (3) Bagaimana menyampaikan kearifan khusus kepada masyarakat.

Menurut Setiawan (2004) dalam (Hamid, 2018), implementasi merupakan perluasan kegiatan yang saling terkoordinasi dalam interaksi tujuan dan tindakan untuk mencapai suatu kebijakan serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Namun menurut Usman (2002) implementasi berfokus pada keberadaan kegiatan, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar kegiatan melainkan kegiatan yang dirancang dan digunakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

Menurut Kamaruli dalam (Roni Ekha Putera, 2015) pada kenyataannya implementasi kebijakan tidak bisa bersifat parsial tetapi harus simultan. Hal ini memerlukan sumber daya dan pendanaan yang memadai, koordinasi dan komitmen antar pemangku kepentingan serta mendukung mekanisme akuntabilitas administratif sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sementara itu menurut Purwanto, implementasi dapat dipahami berdasarkan beberapa kata kunci: (1) Implementasi kebijakan (*to carry out*); (2) Memenuhi janji-janji yang tercantum dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*); (3) Membuahkan hasil sesuai tujuan kebijakan (*to produce*); (4)

Menyelesaikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk kepentingan politik (*to complete*).

Grindle (1980) dalam (Guntari *et al.*, 2023), menyatakan bahwa implementasi adalah suatu proses umum dari sebuah kegiatan pengelolaan yang dapat dipertimbangkan pada tingkat program tertentu. Proses pelaksanaan baru dimulai ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kerja telah disusun dan dana untuk mencapai tujuan telah tersedia dan dialokasikan.

### **2.3.2 Bimbingan Belajar**

Menurut (Prasetya *et al.*, 2019) bimbingan belajar memiliki peran penting dalam membantu proses perkembangan belajar anak, karena tidak hanya apa yang diperoleh di sekolah saja, pembelajaran diluar sekolah mempunyai dampak yang cukup besar dan berpengaruh bagi motivasi belajar siswa. Siswa yang mendapatkan bimbingan belajar cenderung lebih memahami pelajaran yang diberikan. Bimbingan belajar merupakan bentuk dari proses pemberian jam tambahan belajar bagi siswa untuk memaksimalkan proses belajar siswa diluar sekolah. Pendidikan tidak hanya bisa didapat di sekolah namun bisa juga didapatkan di luar sekolah. Seuai dengan yang dikemukakan oleh J. dan Pabbajah dalam (Renna, 2022), menyatakan bahwa pendidikan merupakan sarana untuk membangun peradaban yang lebih maju dalam suatu bangsa. Pendidikan yang baik dan berkualitas dapat menghasilkan sumber daya manusia yang handal, kompeten dan mampu bersaing dengan negara lain. Artinya pendidikan penting adanya untuk menunjang kecerdasan anak bangsa dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Menurut Wardani (2012) dalam (Hendrawati, Ismanto and Iriani, 2021) menyatakan bahwa bimbingan belajar merupakan pilihan oleh siswa untuk memperluas pengetahuan dan menambah jam belajarnya serta sebagai media untuk belajar bersama teman dan berinteraksi dengan guru dalam kondisi yang lebih santai. Pembelajaran sebenarnya bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Bimbingan belajar menjadi salah satu media untuk anak bisa mendapatkan pengetahuan tambahan diluar sekolah. Dengan adanya bimbingan belajar akan membantu siswa secara lebih maksimal dalam belajar sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa.

Menurut Dewa Ketut Sukardi (2013) dalam (Agustini and Septiadi, 2021) menyatakan bahwa bimbingan belajar merupakan suatu proses dimana seseorang memberikan bantuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam belajar sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang terbaik setelah mengalami proses belajar. Bimbingan belajar dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa. Bimbingan belajar dapat diberikan dengan berbagai pertimbangan anantara lain seperti permasalahan belajar dan kondisi lingkungan yang mengharuskan mereka memperoleh bimbingan belajar.

